
Perlukah Kitab Vortaro? (Bahasa!, Tempo, 9 Mei 2010)

Bambang Bujono

Nomor inventaris	KBA-MJL-2010-0005
Jenis dokumen	Artikel majalah
Sumber terbitan	Majalah Berita Mingguan Tempo, Jakarta
Tanggal terbit	9 Mei 2010
Halaman	hlm. 60
Penulis	Bambang Bujono
Subjek	Bahasa Indonesia; Kata serapan; Kitab Vortaro; Kongres Bahasa Indonesia 1938; Amir Sjarifuddin; Sin Po; Kwik Khing Djoen; Jurnalisme
Status	Koleksi pribadi KBA13 Academy

Ringkasan

Tulisan wartawan Bambang Bujono di rubrik Bahasa! Tempo tentang pemakaian kata asing dalam bahasa Indonesia. Bertolak dari Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938, ketika Amir Sjarifuddin mengingatkan bahwa setiap bahasa akan menghadapi soal menyesuaikan kata dan paham asing, penulis menelusuri sejarah pemakaian bahasa Indonesia oleh kaum pergerakan, peran pers seperti Soeara Oemoem dalam memopulerkan kata "wartawan", hingga masa pendudukan Jepang. Ia mengangkat Kitab Vortaro, kamus kata-kata asing susunan Kwik Khing Djoen yang diterbitkan koran Sin Po pada awal 1920-an, merujuk kajian Jérôme Samuel, dan mengusulkan kamus sejenis sebagai pegangan praktis bagi wartawan dan pembaca umum.

Bahasa!

Bambang Bujono*

Perluakah Kitab Vortaro?

RASANYA tak ada bahasa yang tak mengandung kata asing, sedikit atau banyak. Kadang memang terasa merisikan, setidaknya membuat kita bertanya, apakah kata asing tersebut tiada padanannya, atau si pemakai malas mencari, atau pemakai merasa lebih pintar dengan kata asing itu. Maka Ahmad Sahidah dalam rubrik "Bahasa!" majalah ini terheran-heran bahwa *password* lebih licin meluncur dari lidah seorang pembawa acara daripada kata sandi.

Sesungguhnya masalah ini sudah disampaikan dalam Kongres Bahasa Indonesia I, 1938, di Solo, 10 tahun sesudah Sumpah Pemuda dikumandangkan. Ketika itu seorang intelektual muda bernama Amir Sjari-fuddin (kelak menjadi Perdana Menteri RI, 1947-1948) pagi-pagi sudah mengingatkan bahwa "segala bahasa... akan menghadapi soal menyesuaikan kata dan faham asing ke bahasa sendiri."

Sumpah Pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Namun tak lalu kebiasaan dan kebiasaan mendadak berubah. Sehari-hari, masyarakat luas memakai bahasa daerah dan Melayu, dan para cendekiawan menyatakan pikiran dalam bahasa Belanda. Bahkan Kongres Bahasa I itu pun tak lalu mendadak mengubah peri berbahasa masyarakat. Konon, sampai awal 1940-an masih sedikit cendekiawan kita memakai bahasa Indonesia dalam tulisan dan pertemuan organisasi. Ada lalucon, Muhammad Husni Thamrin dari Jakarta mengirimkan telegram ke Kongres I di Solo itu. Ia mendukung Kongres dan berjanji bahwa fraksinya, *Nationale Fractie*, akan memakai bahasa Indonesia dalam si-

dang *Volksraad* mendatang. Tapi itu hanya janji, dan *Pewarta Deli* menulis bahwa "*Nationale Fractie* memulai memakai bahasa Belanda dalam pemandangan umum [di *Volksraad*] sebagai penghargaan atas kongres bahasa Indonesia" (lihat Jérôme Samuel: *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia?* Kepustakaan Populer Gramedia dan Pusat Bahasa, 2008). Mungkin karena hampir setiap hari harus menulis untuk pembaca, kaum wartawanlah yang getol berbahasa Indonesia. Kata "wartawan" itu juga boleh dikata lahir setelah kongres tersebut, terutama atas jasa Soeara Oemoem, surat kabar Surabaya, yang segera memakai kata "wartawan" untuk mengganti *journalist* yang sudah "mendarah daging" pada zaman itu—dalam *Kamus Dewan*, Malaysia, pada lema "jurnalis" dijelaskan bahwa kata ini berasal dari kata Indonesia-Belanda.

Tapi baru pada masa penjajahan Jepang, terlepas dari maksud sang penjajah yang sesungguhnya, segala yang Indonesia diresmikan untuk menggantikan segala yang Barat (Belanda). Cuma, tiga tahun zaman Jepang tak cukup lama untuk mengubah perilaku kita agar berindonesia dalam bahasa sepenuhnya. Begitu Indonesia merdeka, kembalilah ihwal kepraktisan berbahasa. Dan kini pun kita lebih suka menyebut makelar kasus daripada calo atau pialang perkara (lagi, kata ini, "make-lar", dalam *Kamus Dewan* disebut berasal dari Indonesia-Belanda).

Namun sudah cukup menggang-

gukah pemakaian kata serapan itu? Menurut saya belum (salah satu sebabnya karena adanya redaktur bahasa di tiap media). Belum seperti pada masa awal 1920-an, ketika koran *Sin Po* merasa perlu menerbitkan kamus kata-kata asing di media massa ketika itu, karena menduga banyak pembaca sulit memahami kata-kata asing di surat kabar tersebut. Kamus itu disebut *Kitab Vortaro*, buku kamus. Pada pengantar dijelaskan kenapa kamus ini diterbitkan. Menggunakan kata Melayu saja tak cukup sempurna untuk menyampaikan berita, karena itu dicampurkanlah kata-kata asing, tulis Kwik Khing Djoen, penyusunnya. Baru kemudian disadari bahwa tidak semua pembaca memahami kata asing tersebut, dan karena itu diterbitkanlah kamus ini (lihat Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia?*).

"... segala bahasa... akan menghadapi soal menyesuaikan kata dan faham asing ke bahasa sendiri."

AMIR SJARIFUDDIN

Tapi, terlepas apakah kita sudah atau belum merasa terganggu dengan pemakaian kata serapan, mungkin akan menarik jika kita membuat kamus sejenis *Kitab Vortaro* itu. Bukan hanya untuk pembaca umum, melainkan untuk pegangan para wartawan. Kita sudah memiliki tesaurus karya Eko Endarmoko, tapi untuk pekerjaan wartawan sehari-hari, tampaknya kamus ini kurang praktis. Saya kira "jalan kamus" ini akan lebih mangkus daripada undang-undang bahasa dalam menyebarkan semangat berperibahasa Indonesia yang baik dan jelas.

*Wartawan